



PEMERINTAH
KABUPATEN
PATI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi	2
1.3 Isu-isu Strategis	4
1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	5
1.5 Sistematika Penulisan	10
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD	13
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2 Efisiensi Anggaran	60
3.3 Inovasi	67
3.4 Penghargaan	69
BAB IV PENUTUP	70
Kesimpulan	70
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Aparatur (PNS) Setda Kabupaten Pati Tahun 2024.....	5
Tabel 1.2	SDM Aparatur (Non PNS) Setda Kabupaten Pati Tahun 2024	6
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2024	9
Tabel 1.4	Progres Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020-2023	11
Tabel 1.5	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023	11
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja	15
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran Strategis, dan Kebijakan	17
Tabel 2.3	IKU Setda Kabupaten Pati Tahun 2024.....	18
Tabel 2.4	Pemetaan Program dan Kegiatan Per Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024	19
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024	24
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dengan Tahun Sebelumnya	25
Tabel 3.3	Rekapitulasi Realisasi IKD Tahun 2024	26
Tabel 3.4	Tabel Capaian Sasaran Strategis I	34
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Daerah yang Mendukung Sasaran Strategis I	36
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis I	38
Tabel 3.7	Daftar Kebijakan yang Ditindak Lanjuti pada Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024	39

Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis I	42
Tabel 3.9	Tabel Capaian Sasaran Strategis II	45
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Daerah yang Mendukung Sasaran Strategis II	46
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis II	48
Tabel 3.12	Kebijakan yang Ditindak Lanjuti pada Rumpun Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2024	48
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis II	51
Tabel 3.14	Tabel Capaian Sasaran Strategis III	54
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis III	55
Tabel 3.16	Kebijakan pada Penataan Organisasi yang Ditindak Lanjuti pada Tahun 2024	56
Tabel 3.17	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis III	57
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Bagian	59
Tabel 3.19	Capaian Kinerja yang Belum Mencapai Target	60
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Tahun 2024	61
Tabel 3.21	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
Tabel 3.22	Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja masing-masing Bagian Tahun Anggaran 2024	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Berdasarkan Golongan Tahun 2024.....	7
Grafik 1.2	Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024.....	8
Grafik 3.1	Capaian Indikator Kinerja Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024	31
Grafik 3.2	Realisasi Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis I.....	38
Grafik 3.3	Capaian Indikator Sub Kegiatan Sasaran Strategis I.....	44
Grafik 3.4	Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Sasaran Strategis II	53
Grafik 3.5	Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Sasaran Strategis III	58
Grafik 3.6	Capaian Kinerja Bagian	59

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 dapat disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun 2023-2026. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan Adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah ini kami berharap dapat memperoleh masukan yang bersifat konstruktif sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini.

Pati, 28 Februari 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Pati



Drs. Jumani, M.Si
Pembina Utama Madya / IVd
NIP. 19701114 199011 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
5. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
6. Perbup Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Setda Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.

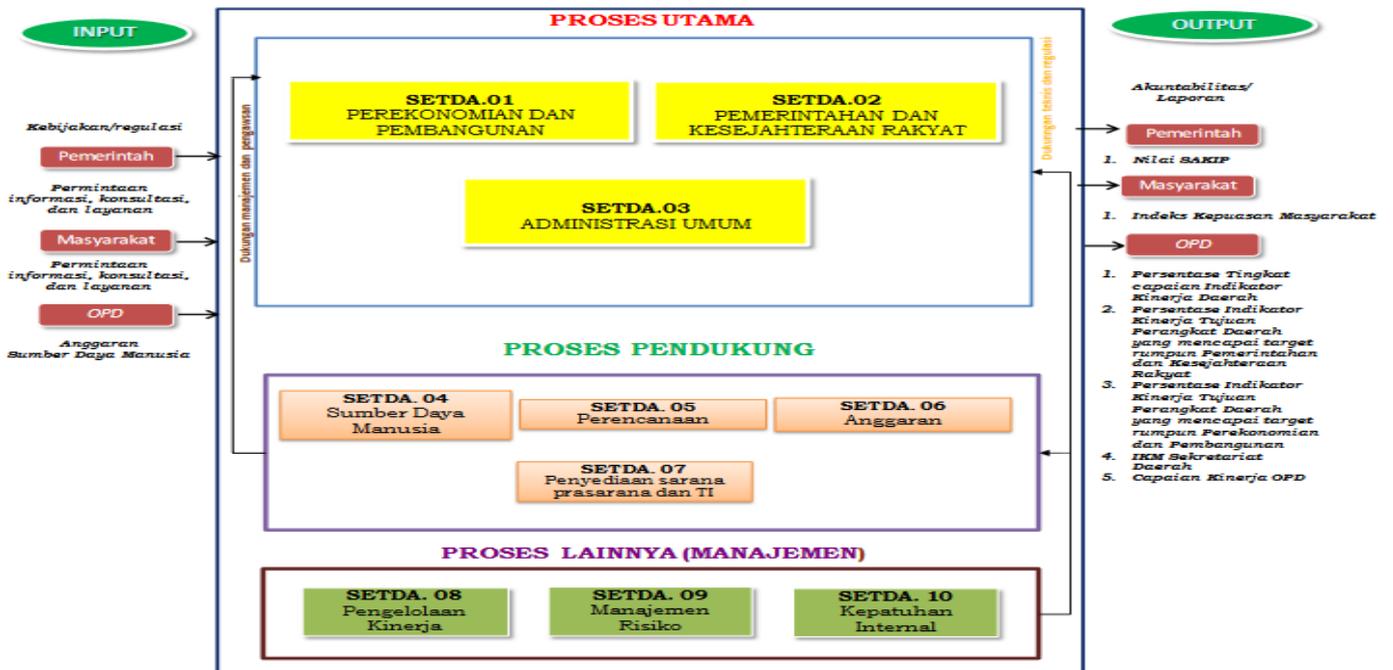
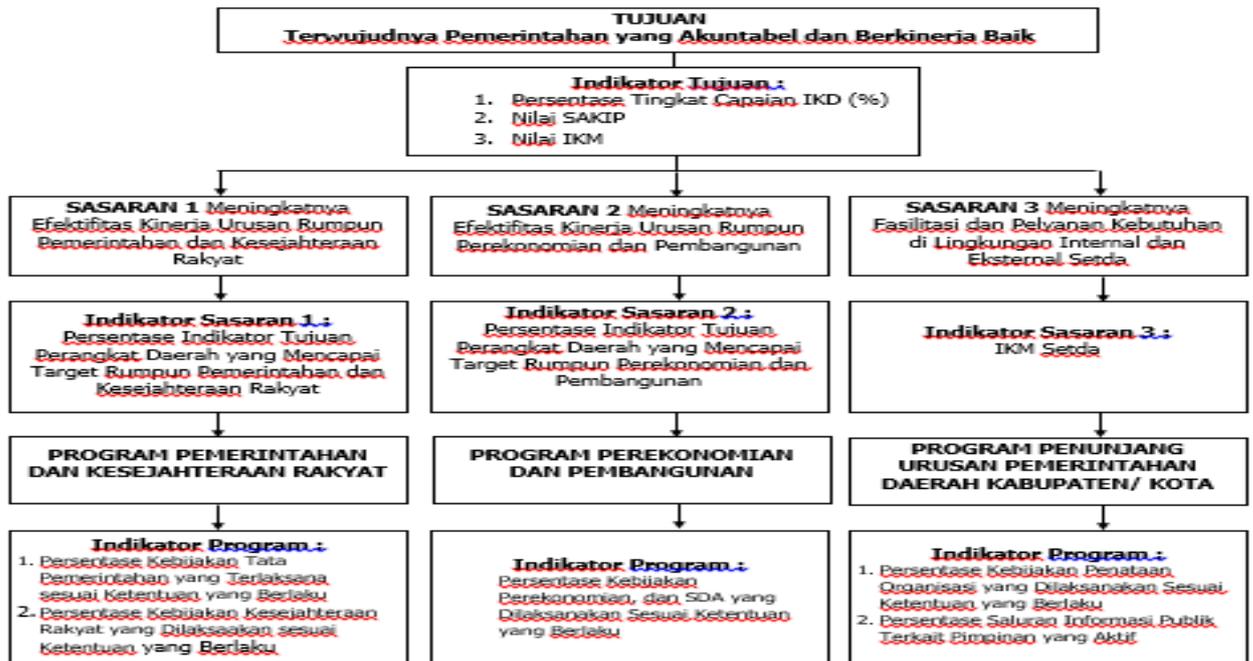
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

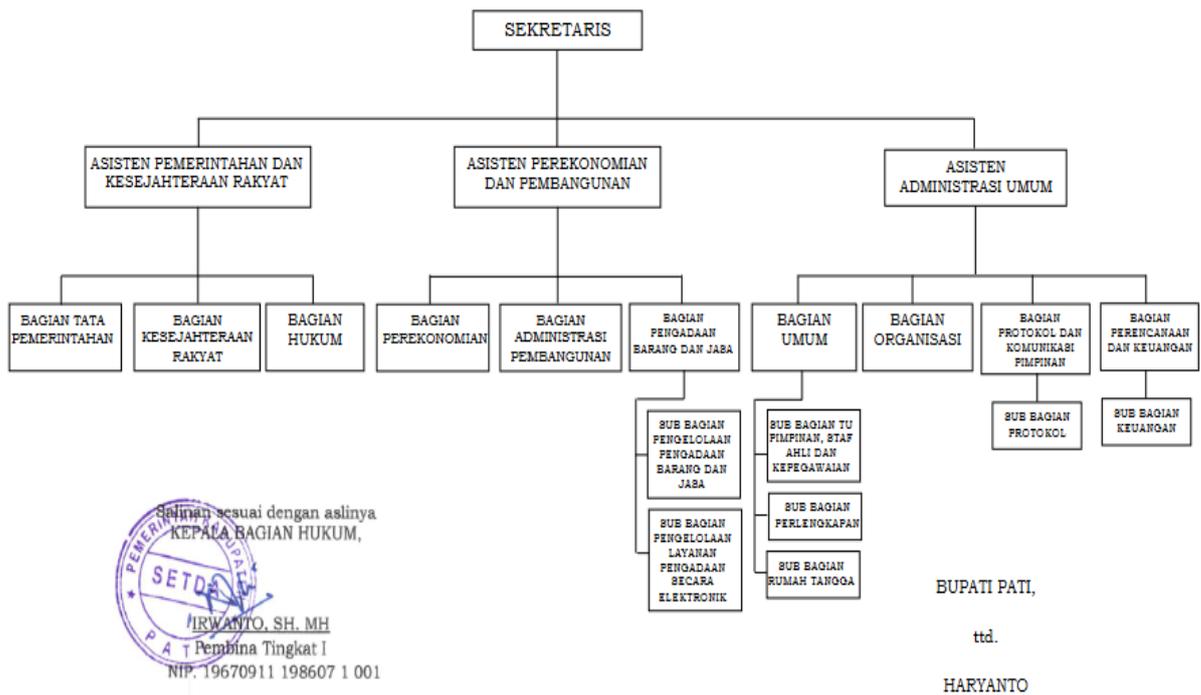
Setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBD dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

1.2. MANDAT KINERJA, PETA PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI

Perangkat Daerah itu ada / dibentuk karena mempunyai tugas / mandate yang harus dilaksanakan atau ada kinerja yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah sampai ke individu pegawai di Perangkat Daerah harus jelas "siapa melakukan apa" (target kinerja jelas dan terukur) sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya, termasuk proses untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan tersebut. Adapun hubungan Antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi





1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang dan menentukan pencapaian tujuan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis selain menggambarkan berbagai permasalahan dan peluang pembangunan yang berbasis kewenangan dan urusan daerah, juga menggambarkan lingkungan strategis Sekretariat Daerah yang meliputi dinamika skala regional, nasional maupun Internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun jangka waktu menengah atau jangka panjang. Sekretariat Daerah Kabupaten Pati memiliki Isu Strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Peran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik;
2. Meningkatkan Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum dalam melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rumpun masing masing;
3. Meningkatkan peran Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Bagian Pengadaan Barang Jasa dalam melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rumpun masing masing dan;
4. Meningkatkan peran Bagian Organisasi dan Bagian Prokompim dalam pelayanan kebutuhan di lingkungan Internal dan eksternal Sekretariat Daerah;

1.4. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati pada Tahun 2024 agar mencapai tujuan dan sasaran organisasi selain manajemen organisasi yang baik sangat diperlukan adanya dukungan baik Sumber Daya Manusia, sarana prasarana maupun anggaran. Adapun dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur, sarana prasarana dan anggaran Tahun 2024 di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut:

a. Dukungan SDM Aparatur

Tabel 1.1
SDM Aparatur (PNS) Setda Kabupaten Pati Tahun 2024

No.	Unit Organisasi	Jumlah
1.	Sekretaris Daerah	1
2.	Staf Ahli	2
3.	Asisten I	1
4.	Asisten II	1
5.	Asisten III	1
6.	Bagian Tata Pemerintahan	8
7.	Bagian Prokompim	11
8.	Bagian Hukum	9

9.	Bagian Perekonomian	9
10.	Bagian Administrasi Pembangunan	10
11.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7
12.	Bagian Organisasi	9
13.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
14.	Bagian Umum	35
15.	Bagian Pengadaan Barang Jasa	12
	Jumlah	124

Sumber : *Bagian Umum Setda Kabupaten Pati*

Tabel 1.2
SDM Aparatur (Non PNS/ THL) Setda Kabupaten Pati Tahun 2024

No.	Unit Organisasi	Jumlah
1.	Bagian Tata Pemerintahan	3
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7
3.	Bagian Hukum	1
4.	Bagian Perekonomian	3
5.	Bagian Administrasi Pembangunan	0
6.	Bagian PBJ	0
7.	Bagian Organisasi	0
8.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	13
9.	Bagian Umum	37
10.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	4
	Jumlah	68

Sumber : *Bagian Umum Setda Kabupaten Pati*

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah SDM di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati (PNS dan Tenaga Non PNS / THL) sebanyak 192 Orang yang terbagi kedalam 10 Bagian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Pati didukung dengan susunan kepegawaian dengan jumlah karyawan karyawan PNS sebanyak 124 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan golongan

Golongan IV sebanyak 18 orang, terdiri dari :

- ❖ IV/a : 6 orang
- ❖ IV/b : 5 orang
- ❖ IV/c : 6 orang
- ❖ IV/d : 1 orang

Golongan III sebanyak 87 orang, terdiri dari:

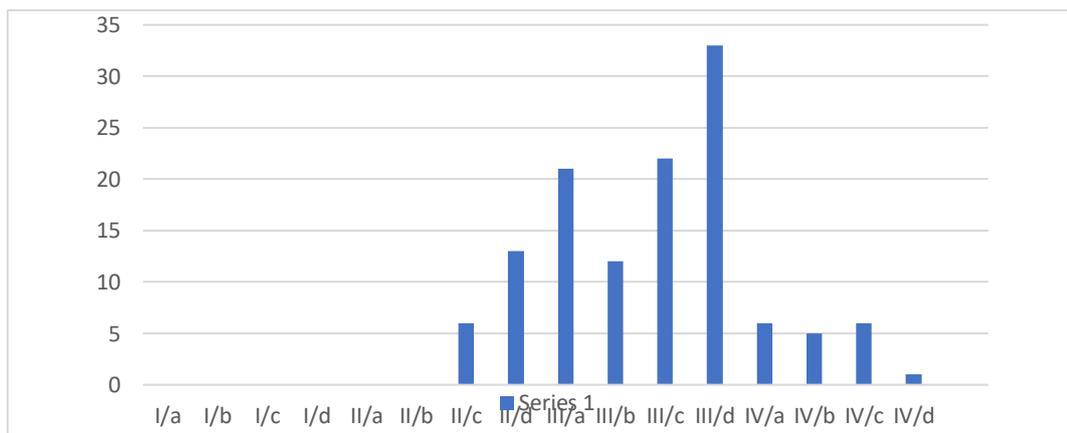
- ❖ III/a : 21 orang
- ❖ III/b : 12 orang
- ❖ III/c : 22 orang
- ❖ III/d : 33 orang

Golongan II sebanyak 19 orang, terdiri dari:

- ❖ II/a : -
- ❖ II/b : -
- ❖ II/c : 6 orang
- ❖ II/d : 13 orang

Total : 124 orang

Grafik 1.1
Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan SETDA Kabupaten Pati Berdasarkan Golongan Tahun 2024



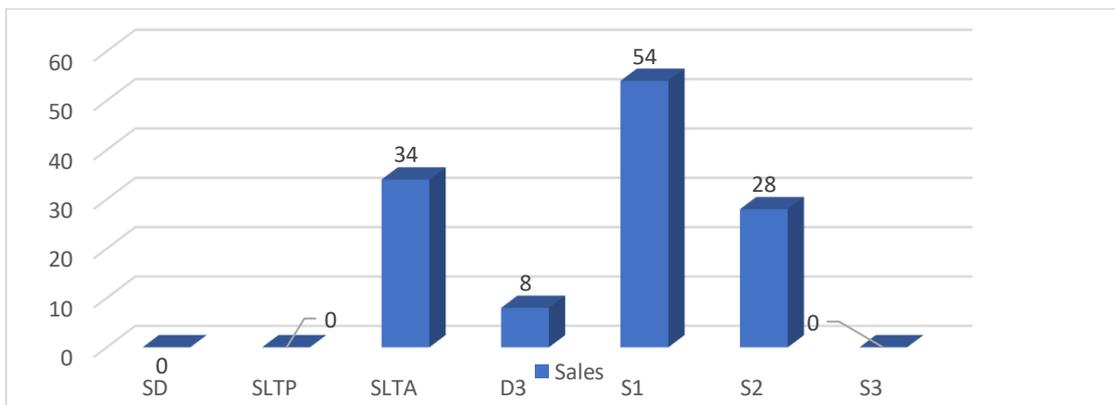
Dari grafik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah PNS terbanyak di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pati adalah PNS yang mempunyai golongan ruang yaitu III/d sebanyak 33 orang.

1. Berdasarkan pendidikan

❖ SD	:	-
❖ SLTP	:	-
❖ SLTA	:	34 orang
❖ D3	:	8 orang
❖ S1	:	54 orang
❖ S2	:	28 orang



Grafik 1.2
Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang Pendidikan sebagian besar PNS di Lingkup kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pati adalah Strata 1 (S1) dengan persentase atau sebanyak 54 orang.

b. Dukungan Sarana dan Prasarana

Tabel 1.3

Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah per 31 Desember 2024

No	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2024	
		Satuan	Jumlah
1	Tanah	Bidang	3
2	Alat Besar	Unit	33
3	Komputer	Unit	626
4	Alat Keselamatan Kerja	Unit	10
5	Peralatan Olahraga	Unit	2
6	Alat Angkutan	Unit	126
7	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Unit	11
8	Alat Pertanian	Unit	8
9	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit	4.077
10	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Unit	293
11	Alat Laboratorium	Unit	61
12	Alat Persenjataan	Unit	13
13	Bangunan Gedung	Unit	33
14	Bangunan Air	Unit	1
15	Instalasi	Unit	7
16	Jaringan	Unit	11
17	Bahan Perpustakaan	Unit	424
19	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	Unit	1

Sumber : Bagian Umum Setda Kabupaten Pati

c. Dukungan Anggaran

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, jumlah anggaran belanja keseluruhan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 **sebelum perubahan** ditetapkan sebesar **Rp. 46.696.102.000,-** dan setelah **perubahan sebesar Rp. 49.037.042.000,-** terdiri atas Belanja Operasional dan Non Operasional. Sedangkan Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang sesuai dengan **Perjanjian Kinerja** Sekretaris Daerah Kabupaten Pati sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp. 14.412.680.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 15.426.619.000,- .

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi peta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan analisis capaian kinerja Sekretariat Daerah.

C. Akuntabilitas Keuangan

Sub Bab ini menyajikan uraian jumlah dan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2024.

D. Inovasi

Sub Bab ini menyajikan uraian inovasi yang ada pada Sekretariat Daerah.

E. Penghargaan

Sub Bab ini menyajikan uraian penghargaan yang diraih pada Sekretariat Daerah.

BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran berisikan data pendukung berupa Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024.

1.6. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja, maka setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Instansi Pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah. Progress nilai hasil evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pati kurun waktu 2020 – 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Pogres Nilai SAKIP Setda Kabupaten Pati
Tahun 2020 – 2023

No.	Tahun	Nilai	Kategori	Keterangan
1	2020	77,63	BB	Sangat Baik
2	2021	78,59	BB	Sangat Baik
3	2022	79,15	BB	Sangat Baik
4	2023	79,15	BB	Sangat Baik

Sumber: LHE (Laporan Hasil Evaluasi LKjIP) 2020-2023

Berdasarkan tabel 1.4 diatas menunjukkan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, pencapaian SAKIP di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati mendapatkan kategori "BB" atau Sangat Baik. Hal ini tidak terlepas dari peran seluruh pemegang program dan kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Selain itu kami akan terus berupaya untuk selalu meningkatkan nilai capaian SAKIP Sekretariat Daerah disetiap tahunnya. Adapun Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2023 terhadap Setda Kabupaten Pati sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 1.5
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Setda Kabupaten Pati
Tahun 2023

No.	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Mempublikasikan dengan tepat waktu Dokumen Perencanaan melalui website resmi Perangkat Daerah atau media lain	Menggunakan layanan website dan google drive untuk mempublikasikan dokumen perencanaan agar dapat diakses oleh seluruh bagian yang ada pada Setda Kabupaten Pati
2.	Mempublikasikan dengan tepat waktu Dokumen Laporan Kinerja melalui website resmi Perangkat Daerah atau media lain	Menggunakan layanan website dan google drive untuk mempublikasikan dokumen laporan kinerja dengan tepat waktu.

3.	Lebih tertib dalam menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Rutin dalam menyampaikan laporan capaian kinerja triwulan ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pati, Serta mempublikasikannya pada layanan website dan google drive yang dibuat oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan agar seluruh bagian yang ada pada Setda Kabupaten Pati dapat memantau laporan capaian kinerja triwulan
----	---	---

Sumber : LHE (Laporan Hasil Evaluasi) LKjIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penilaian SAKIP Setda Kabupaten Pati dengan nilai 79,15 dengan kategori yang artinya pencapaian SAKIP Setda Kabupaten Pati Tahun 2023 masih sama terhadap pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tahun 2022, terdapat beberapa catatan / rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dengan cara menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan Evaluasi Internal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2023-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati. Rencana Strategis Sekretariat Daerah mengandung tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan, sehingga Renstra Sekretariat Daerah ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Secara teknis penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2.1.1 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pati telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Tujuan utama Sekretariat Daerah adalah **"Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik"**. Pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan SDM yang kompeten tersebut diatas memiliki indikator kinerja yang tercantum dan mendukung capaian kinerja RPD yaitu upaya peningkatan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD), Nilai SAKIP, dan Nilai IKM.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai SAKIP yang merupakan tugas dari Sekretariat Daerah untuk 4 (empat) tahun kedepan agar dapat tercapai minimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau bahkan dapat mencapai nilai lebih. Untuk dapat mencapai tujuan sesuai apa yang diharapkan maka harus ditetapkan sasaran yang jelas dan terukur. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sehingga sasaran berdampak dalam pencapaian dari tujuan.

2.1.2 SASARAN

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program Dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Bertitik tolak dari tujuan dan beserta indikatornya yang telah ditetapkan maka Sekretariat Daerah Kabupaten menetapkan 3 (tiga) pokok sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan tahun 2023-2026.

Sasaran utama yang ditetapkan dan hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Meningkatnya Efektifitas Kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Meningkatnya Efektifitas Kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan;
3. Meningkatnya Fasilitasi dan Pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda.

Tujuan Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2023 - 2026, dirumuskan sebagai berikut **"Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik"**. Selanjutnya Sekretariat Daerah menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama Tahun 2023 – 2026.

2.1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati setiap Tahun Anggaran menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Setda Kabupaten Pati.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik		1. Persentase Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah	100%	100%	100%	100%
			2. Nilai SAKIP	65,04	65,50	65,70	66,00
			3. Nilai IKM	3,41	3,42	3,44	3,45
		1. Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%
	2. Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	
	3. Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda	IKM SETDA	3,52	3,53	3,54	3,55	

Sumber : Renstra Setda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati merencanakan serangkaian strategi yang akan dijalankan selama 4 (empat) tahun ke depan untuk mewujudkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan SDM yang kompeten.

Rumusan strategi yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi terkait kinerja urusan Kesejahteraan Rakyat;
2. Fasilitasi kerjasama daerah dalam mendukung Pembangunan;
3. Koordinasi dan evaluasi terkait kinerja urusan Perekonomian dan SDA;
4. Koordinasi dan evaluasi dalam mendukung Pembangunan daerah;
5. Koordinasi kegiatan yang terkait dengan Perangkat Daerah lain.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah dalam mewujudkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan SDM yang kompeten serta meningkatkan kualitas pelayanan public instansi pemerintah sesuai dengan sasaran-sasarannya mengambil kebijakan selama 2023-2026 sebagai berikut yaitu :

1. Pemantauan dan evaluasi kinerja urusan Kesejahteraan Rakyat;
2. Koordinasi terkait kerjasama daerah;
3. Masih banyak potensi kerjasama daerah;
4. Kerjasama daerah yang sudah ada;
5. Pemantauan dan evaluasi kinerja urusan terkait Perekonomian dan SDA;
6. Pengendalian Pembangunan infrastruktur (Pembangunan fisik) dan Non Infrastruktur;
7. Koordinasi terkait media publikasi dengan Diskominfo; dan
8. Koordinasi terkait permasalahan batas desa dan konflik pertanahan dengan Perangkat Daerah.

Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik	Meningkatnya efektifitas kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatkan Kebijakan Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku	Terwujudnya peraturan bidang tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (PERDA, PERBUP, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)	
			Tersedianya analisis kebijakan bidang tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	
			Terlaksananya verifikasi rancangan / konsep produk hukum daerah	
			Terselesaikannya kasus pada bidang hukum	
	Meningkatnya efektifitas kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatkan kebijakan perekonomian, pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Meningkatkan kebijakan perekonomian, pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Terwujudnya peraturan bidang perekonomian pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (PERDA, PERBUP, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)
				Tersedianya analisis kebijakan bidang perekonomian
				Terlaksananya pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%
				Tercapainya pemilihan penyedia (tender) oleh UKPBJ
	Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Sekretariat Daerah	Meningkatkan kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Meningkatkan kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Terwujudnya peraturan bidang organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dalam peraturan daerah
Tersedianya analisis kebijakan bidang Organisasi				
Meningkatkan saluran informasi publik terkait pimpinan yang aktif		Meningkatkan saluran informasi publik terkait pimpinan yang aktif	Terlaksananya saluran informasi publik terkait pimpinan	

Sumber : Renstra Setda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, serta merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Sekretariat Daerah Kab. Pati akan melaksanakan APBD untuk ,mewujudkan komitmen yang tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 (Lampiran 1). Dokumen Perjanjian Kinerja ini disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda Kabupaten Pati
Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik	1. Persentase Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah	100%
		2. Nilai SAKIP	65.50
		3. Nilai IKM	3.42
1.1	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%
1.2	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	100%
1.3	Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda	IKM SETDA	3.53

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Setda Kabupaten Pati Tahun 2024

				<p>Keluarga, Warga, dan Kelompok</p> <p>5. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p>	Rp. 20.000.000,-
				<p>Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum</p> <p>1. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah</p> <p>2. Fasilitas Bantuan Hukum</p> <p>3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</p>	<p>Rp. 1.620.680.000,-</p> <p>Rp. 273.900.000,-</p> <p>Rp. 488.180.000,-</p> <p>Rp. 858.600.000,-</p>
<p>Sasaran 2:</p> <p>Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan</p>	<p>Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan</p>	<p>Program Perekonomian dan Pembangunan</p>	<p>1. Persentase Kebijakan Perekonomian, Pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</p> <p>1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</p> <p>2. Pengendalian Distribusi Perekonomian</p> <p>3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</p>	<p>Rp. 408.475.000,-</p> <p>Rp. 42.935.000,-</p> <p>Rp. 216.765.000,-</p> <p>Rp. 148.775.000,-</p>
				<p>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</p> <p>1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</p> <p>2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</p>	<p>Rp. 136.000.000,-</p> <p>Rp. 126.000.000,-</p> <p>Rp. 10.000.000,-</p>
				<p>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</p> <p>1. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan</p> <p>2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</p> <p>3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</p>	<p>Rp. 250.000.000,-</p> <p>Rp. 32.000.000,-</p> <p>Rp. 135.500.000,-</p> <p>Rp. 82.500.000,-</p>

				Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3. Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 170.000.000,- Rp. 36.300.000,- Rp. 41.700.000,- Rp. 92.000.000,-
Sasaran 3: Meningkatnya fasilitas dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda	IKM Setda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase Kebijakan Penataan Organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Persentase saluran informasi publik terkait pimpinan yang aktif	Kegiatan Penataan Organisasi 1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 680.000.000,- Rp. 350.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 200.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 25.000.000,-
				Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1. Fasilitasi Keprotokolan 2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp. 1.643.454.000,- Rp. 135.000.000,- Rp. 85.754.000,- Rp. 1.422.700.000,-

Sumber: Dokumen Renja Setda Kabupaten Tahun 2024

2.4. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Aplikasi E-Sakip adalah Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan kinerja organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pati. E-Sakip bertujuan untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan public;
3. Memudahkan pengukuran kinerja instansi pemerintah;
4. Meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya manusia;
5. Mendapatkan rekapitulasi data yang akurat dan dapat dimanfaatkan kembali.

Selain itu E-Sakip memiliki banyak kemanfaatan, antara lain :

1. Membantu memperbaiki regulasi dan kebijakan;
2. Mendorong inovasi dalam program dan kegiatan;
3. Memberikan dasar untuk memberikan reward dan punishment.

E-Sakip memuat berbagai aktivitas, alat, dan prosedur untuk penetapan dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah merupakan satu langkah dalam menilai tingkat pencapaian terhadap target sasaran sebagai nilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026. Kinerja Sekretariat Daerah menggambarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran serta tingkat pencapaian masing-masing program dan kegiatan. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati juga menginformasikan realisasi indikator sasaran melalui pengukuran kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui capaian keberhasilan kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah merupakan indikator sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama Kabupaten Pati yaitu terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja baik. Adapun IKU Sekretariat Daerah dan targetnya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu:

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi / Melampaui Target
2	=100 %	Sesuai Target
3	<100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Kategori	Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik		1. Persentase Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah	100%	90,91%*	90,91%*	TIDAK MENCAPAI TARGET	100%
			2. Nilai SAKIP					
		3. Nilai IKM	65.50	65,89	100,60%	MELAMPAUI TARGET	66,00	
			3.42	3,78	110,53%	MELAMPAUI TARGET	3,45	
	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%*	100%*	MENCAPAI TARGET	100%	
	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	100%	78,57%*	78,57%*	TIDAK MENCAPAI TARGET	100%	
	Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda	IKM SETDA	3.53	3,91	110,76%	MELAMPAUI TARGET	3,55	

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati, Tahun 2024

* : Capaian tahun 2024 masih dalam proses olah data

Tabel 3.2
Perbandingan capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Pati dengan tahun sebelumnya

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian 2024
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik		1. Persentase Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah	100%	100%	100%	100%	90,91*	90,91%*
			2. Nilai SAKIP	65.04	65,48	100,68%	65.50	65,89	100,60%
			3. Nilai IKM	3.41	3,64	106,74%	3.42	3,78	110,53%
		Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%*	100%*
	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	78,57%*	78,57%*	
	Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda	IKM SETDA	3.52	3.89	110,51%	3.53	3.91	110,76%	

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati, Tahun 2024

* : Capaian tahun 2024 masih dalam proses olah data

TABEL 3.3**REKAPITULASI REALISASI IKD TAHUN 2024****1. RUMPUN ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA**

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kriteria	Keterangan
1	Angka Kemiskinan	9,31%	9,65%	9,17%	95,03%	Sangat Tinggi	Angka Bersifat Sementara dari BPS
a	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,64	1,50	1,64*	91,46%*	Sangat Tinggi	Publish BPS baru P1 Provinsi Jateng
b	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,42	0,32	0,42*	76,19%*	Tinggi	Publish BPS baru P2 Provinsi Jateng
c	Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum	82,70%	82,79%	83,53%	100,89%	Sangat Tinggi	
d	Persentase penduduk dengan akses layanan sanitasi	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	
e	Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas penyehatan dasar	100%	87,15%	100%*	114,74%*	Sangat Tinggi	Masih dalam proses olah data oleh Dinas Kesehatan Kab. Pati. Estimasi akhir Februari nilai rilis
f	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	95,69%	95,48%	100%	104,73%	Sangat Tinggi	

2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,59%	73,48%	74,10%	100,84%	Sangat Tinggi	
a	Umur Harapan Hidup	76,39	76,33	74,10	97,08%	Sangat Tinggi	
b	Indeks Pembangunan Keluarga	63,07	58,20	63,07*	108,37%*	Sangat Tinggi	Publish BPS pada bulan Maret - April
c	Rata-rata lama sekolah	7,80	7,63	7,82	102,49%	Sangat Tinggi	
d	Harapan lama sekolah	12,96	13,13	12,98	98,86%	Sangat Tinggi	
e	Pengeluaran per kapita	11.385,00	11.104,80	11.829,00	106,52%	Sangat Tinggi	
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,49	92,31	92,49*	100,19%*	Sangat Tinggi	Publish BPS bulan Maret-April
a	Penurunan kesenjangan umur harapan hidup antara perempuan dan laki-laki	1,05%	1,05%	1,05%*	100%*	Sangat Tinggi	Publish BPS pada bulan Mei-Juni
b	Penurunan kesenjangan rata-rata lama sekolah antara Perempuan dan laki-laki	0,90%	0,86%	0,90%*	104,65%*	Sangat Tinggi	Publish BPS pada bulan Mei-Juni
c	Penurunan kesenjangan harapan lama sekolah antara Perempuan dan laki-laki	0,99%	0,97%	0,99%*	102,06%*	Sangat Tinggi	Publish BPS pada bulan Mei-Juni
d	Penurunan kesenjangan pengeluaran per kapita antara Perempuan dan laki-laki	0,66%	0,66%	0,66%*	100%*	Sangat Tinggi	Publish BPS pada bulan Mei-Juni
e	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,73	67,30	67,73*	100,64%*	Sangat Tinggi	Publish BPS pada bulan Mei-Juni

2. RUMPUN ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kriteria	Keterangan
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,02%	4,72%	5,73%	121,40%	Sangat Tinggi	
a	Pertumbuhan PDRB lap. Usaha pertanian	3,26%	3,65%	0,82%*	22,47%*	Sangat Rendah	Publish BPS Bulan Maret 2025
b	Pertumbuhan PDRB lap. Usaha industri pengolahan	6,45%	5,43%	6,45%*	118,78%*	Sangat Tinggi	Publish BPS Bulan Maret 2025
c	Pertumbuhan PDRB lap. Usaha perdagangan	5,93%	3,49%	5,93%*	169,91%*	Sangat Tinggi	Publish BPS Bulan Maret 2025
d	PDRB per kapita ADHB	40.294,88	45.014,27	40.294,88*	96,75%*	Sangat Tinggi	Publish BPS Bulan Maret 2025
e	PDRB per kapita ADHK	25.736,05	37.077,90	25.736,05*	69,41%*	Sedang	Publish BPS Bulan Maret 2025
f	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	76,52%	77,00%	78,92%	102,49%	Sangat Tinggi	
g	Indeks Ketimpangan Pendapatan (versi World Bank)	21,56	20,14	21,56*	107,05%*	Sangat Tinggi	Publish BPS sekitar Bulan Maret-April 2025
h	Angka kriminalitas	2,79	1,41	2,02	69,80%	Sedang	
i	Persentase kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB	0,04%	0,055%	0,04%*	137,50%*	Sangat Tinggi	Publish BPS sekitar Bulan Maret 2025
j	IKLH	60,63	52,87	61,96	117,19%	Sangat Tinggi	

2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,29%	3,49%	3,87%	90,18%*	Tinggi	Publish BPS sekitar Bulan Maret-April 2025
a	Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja	1,84	1,40	1,15	121,74%	Sangat Tinggi	
b	TPAK	73,10%	69,30%	76,75%	110,75%	Sangat Tinggi	

3. RUMPUN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

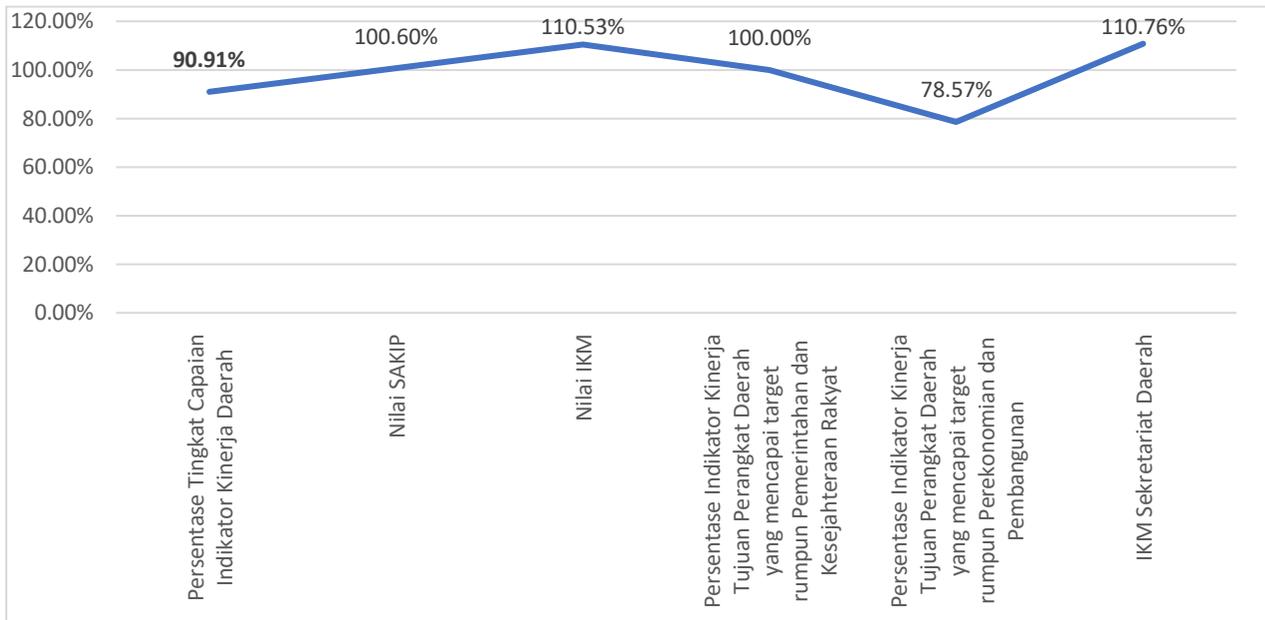
No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kriteria	Keterangan
1	Indeks Reformasi Birokrasi	68,54	62,20	79,71	128,15%	Sangat Tinggi	
a	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,62	3,50	3,78	108,00%	Sangat Tinggi	
b	Nilai SAKIP	65,47	65,50	65,89	100,60%	Sangat Tinggi	
c	Indeks Profesionalisme ASN	66,25	65,00	79,20	121,85%	Sangat Tinggi	
d	Nilai SPIP Terintegrasi						
	- Maturitas SPIP	3,00	3,00	3,00*	100%*	Sangat Tinggi	Masih dalam proses olah data oleh BPKP Provinsi Jateng
	- Manajemen Risiko Instansi (MRI)	2,00	3,00	2,00*	66,67%*	Sedang	Masih dalam proses olah data oleh BPKP Provinsi Jateng
	- IEPTK	2,00	2,00	2,00*	100%*	Sangat Tinggi	Masih dalam proses olah data oleh BPKP Provinsi Jateng

e	Indeks SPBE	3,67	2,78	3,75	134,89%	Sangat Tinggi	
f	IPKD	79,55	67,05	79,55*	118,64%*	Sangat Tinggi	Masih dalam proses olah data oleh BPKAD
g	Desentralisasi Fiskal						
	- Rasio Ketergantungan Fiskal	84,02	85,02	84,02*	98,82%*	Sangat Tinggi	Masih dalam proses olah data oleh BPKAD
	- Rasio Kemandirian Fiskal	15,98	17,78	15,98*	89,88%*	Tinggi	Masih dalam proses olah data oleh BPKAD

Sumber : Olah Data Bagian Perencanaan Keuangan

Rata-rata Capaian IKU Setda pada Tahun 2024 sebesar 98,56%. Gambaran Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 dapat dilihat pada diagram berikut:

Grafik 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Pati Tahun 2024



Sumber : Bagian di Lingkungan Setda Kab. Pati

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja Sasaran Strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap Sasaran Strategis. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan :

1. Melakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

ANALISIS CAPAIAN TUJUAN

Keberhasilan tujuan diukur dengan tiga indikator yaitu Persentase Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah, Nilai SAKIP dan Nilai IKM. Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2024 ada dua indikator yang melampaui target, dan ada satu indikator yang tidak mencapai target diantaranya :

1. Nilai SAKIP

Terkait Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengalami kenaikan nilai dari 65,48 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 ini menjadi 65,89. Sekalipun capaian nilai SAKIP mengalami kenaikan yang tidak begitu signifikan akan tetapi kami optimis bahwa nilai SAKIP kedepannya akan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagai tindak lanjut atas Laporan hasil Evaluasi Kabupaten Pati, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan beberapa Rekomendasi untuk dilaksanakan sebagai Upaya perbaikan penyelenggaraan SAKIP di Kabupaten Pati. Adapun Upaya Tindak lanjut Guna meningkatkan capaian SAKIP di Kabupaten Pati ke depan diantaranya sebagai berikut:

- Melaksanakan Desk dengan Perangkat Daerah bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Pati terkait :
 - a. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Penyempurnaan Pohon Kinerja Pemda sesuai PermenPAN 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
 - c. Melengkapi cascading Perangkat Daerah dengan Definisi Operasional;
 - d. Penambahan bukti dukung evaluasi pelaksanaan operasional dan hasil rapat koordinasi pelaksanaan operasional kegiatan pada esr.menpan.go.id dalam hal ini dok renja dan laporan Rakorpok;
 - e. Meningkatkan kualitas pengisian evaluasi renja dengan melengkapi penjelasan faktor pendorong dan penghambat;
 - f. Mendorong Perangkat Daerah untuk menggunakan hasil analisa faktor penghambat dalam perencanaan kinerja kedepan;
- Bekerjasama dengan Inspektorat Daerah dan BPKAD melaksanakan Desk dan review RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.
- Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal yang sudah dilakukan sebagai bagian dari penilaian reward and punishment kepada Perangkat Daerah sehingga evaluasi AKIP Internal dapat mendorong perbaikan Implementasi SAKIP

yang ditindaklanjuti dengan Raperbup TPP dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah.

2. Nilai IKM

Nilai SKM Kabupaten Pati Tahun 2024 mengalami tren kenaikan nilai dengan nilai SKM yang diperoleh sebesar 94,51 dengan nilai indeks sebesar 3,78 untuk pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dapat disimpulkan bahwa rata – rata pengguna layanan yang datang ke tempat pelayanan di instansi penyelenggaraan layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa mutu pelayanan Pemerintah Kabupaten Pati pada Tahun 2024 berkategori Sangat Baik.

Sebagai Upaya Tindak Lanjut untuk mempertahankan Pelayanan dengan mutu Layanan Sangat Baik guna memenuhi fasilitas dalam hal sarana prasarana layanan publik yang memadai dan nyaman, diantaranya dengan memberikan kemudahan akses, ketersediaan parkir, fasilitas bagi anak dan ibu menyusui, fasilitas bagi penyandang disabilitas bahkan hingga ke ruang tunggu yang nyaman agar dikonsepsi dengan cukup Baik.

Selain sarana prasarana biaya atau tarif adalah salah satu unsur yang perlu diperhatikan. Organisasi Sektor Publik senantiasa dituntut untuk bekerja secara akuntabel dengan mengedepankan kejujuran dan profesionalisme dalam segala hal baik SDM, pengelolaan, maupun yang terpenting manajemen keuangan. Komponen standar pelayanan public ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas luasnya kepada public sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat meminimalisir tindakan- tindakan mal administrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur penundaan berlarut dan sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan penyimpangan. Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan dalam penyelenggaraannya.

3. Indikator Kinerja Daerah

Persentase Tingkat capaian indikator kinerja daerah adalah salah satu indikator tujuan Sekretariat Daerah yang belum mencapai target pada Tahun 2024. Dengan capaian sebesar 90,91% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh karena ada beberapa indikator kinerja daerah yang memang belum

mencapai target selain itu yang ada nilainya yang belum rilis pada Tahun 2024 ini, sehingga masih menggunakan nilai capaian pada Tahun 2023 akan tetapi kami selalu mengawal capaian indikator kinerja daerah yang tersebar pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pati dan tetap optimis capaian pada Tahun 2024 dapat mencapai target begitupun untuk tahun-tahun selanjutnya.

ANALISIS KETERCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Analisis terhadap Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada masa akhir Renstra, disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis I “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat”

Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, ditetapkanlah sasaran Meningkatkan Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Kinerja Persentase Indikator Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Berikut adalah hasil pengukuran penetapan kinerja Sekretariat Daerah yang telah dicapai Tahun 2024 dan dilakukan analisis capaian atas indikator kinerja sasaran Strategis 1 “**Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**” sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tabel Capaian Sasaran strategis 1 Meningkatkan Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori
1	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%*	100%*	Mencapai Target

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati, Tahun 2024

* : capaian tahun 2024 masih dalam proses olah data

Berdasarkan tabel 3.3 diatas capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat” adalah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% namun masih ada beberapa nilai indikator kinerja pada Tahun 2024 yang mendukung sasaran strategis I masih menggunakan nilai capaian pada Tahun 2023 oleh karena nilai capaian pada Tahun 2024 masih dalam proses olah data. Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 sebesar 100% tersebut diperoleh dari perhitungan sebagaimana berikut :

FORMULA :

$$\frac{\text{(Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang memenuhi kriteria penilaian tinggi sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 hal. 494)}}{\text{Indikator Kinerja Daerah yang masuk dalam Rumpun Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat}} \times 100\%$$

Tabel Skala Penilaian Peringkat Kinerja sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 hal. 494 sebagai berikut :

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Capaian Indikator Kinerja Daerah yang mendukung Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat” sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Daerah yang mendukung Sasaran Strategis 1
“Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat”

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kriteria
1	Angka Kemiskinan	9,31%	9,65%	9,17%	95,03%	Sangat Tinggi
a	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,64	1,50	1,64*	91,46%*	Sangat Tinggi
b	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,42	0,32	0,42*	76,19%*	Tinggi
c	Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum	82,70%	82,79%	83,53%	100,89%	Sangat Tinggi
d	Persentase penduduk dengan akses layanan sanitasi	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
e	Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas penyehatan dasar	100%	87,15%	100%*	114,74%*	Sangat Tinggi
f	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	95,69%	95,48%	100%	104,73%	Sangat Tinggi
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,59%	73,48%	74,10%	100,84%	Sangat Tinggi
a	Umur Harapan Hidup	76,39	76,33	74,10	97,08%	Sangat Tinggi
b	Indeks Pembangunan Keluarga	63,07	58,20	63,07*	108,37%	Sangat Tinggi
c	Rata-rata lama sekolah	7,80	7,63	7,82	102,49%	Sangat Tinggi
d	Hraapan lama sekolah	12,96	13,13	12,98	98,86%	Sangat Tinggi
e	Pengeluaran per kapita	11.385,00	11.104,80	11.829,00	106,52%	Sangat Tinggi
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,49	92,31	92,49*	100,19%*	Sangat Tinggi
a	Penurunan kesenjangan umur harapan hidup antara perempuan dan laki-laki	1.05%	1.05%	1.05%*	100%*	Sangat Tinggi
b	Penurunan kesenjangan rata-rata lama sekolah antara Perempuan dan laki-laki	0,90%	0,86%	0,90%*	104,65%*	Sangat Tinggi
c	Penurunan kesenjangan harapan lama sekolah antara Perempuan dan laki-laki	0,99%	0,97%	0,99%*	102,06%*	Sangat Tinggi
d	Penurunan kesenjangan pengeluaran per kapita antara Perempuan dan laki-laki	0,66%	0,66%	0,66%*	100%*	Sangat Tinggi
e	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,73	67,30	67,73*	100,64%*	Sangat Tinggi

Sumber: Data Badan Pusat Statistik tahun 2024

* : Capaian tahun 2023, capaian tahun 2024 masih dalam proses olah data

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat disimpulkan analisa sebagai berikut dimana Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 yang mendukung Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat” telah **mencapai target** yang ditetapkan sebesar 100% oleh karena 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Daerah yang mendukung Sasaran Strategis 1 tersebut telah memenuhi kriteria penilaian tinggi dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang memenuhi kriteria penilaian tinggi Permendagri No. 86 Tahun 2017 hal. 494 = **sebanyak 19 Indikator Kinerja (terdiri dari 3 indikator tujuan dan 16 indikator sasaran)**
2. Jumlah Indikator Kinerja Daerah pada rumpun Pemerintahan dan Kesra : **sebanyak 19 Indikator Kinerja (terdiri dari 3 indikator tujuan dan 16 indikator sasaran)**

Jadi perhitungannya : $(19/19) \times 100\% = 100\%$

Adapun strategi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis 1 **“Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat”** Ini diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Ada 4 (empat) kegiatan yang berasal dari 1 (satu) program kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis 1 **“Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat”** diantaranya adalah :

Program

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan

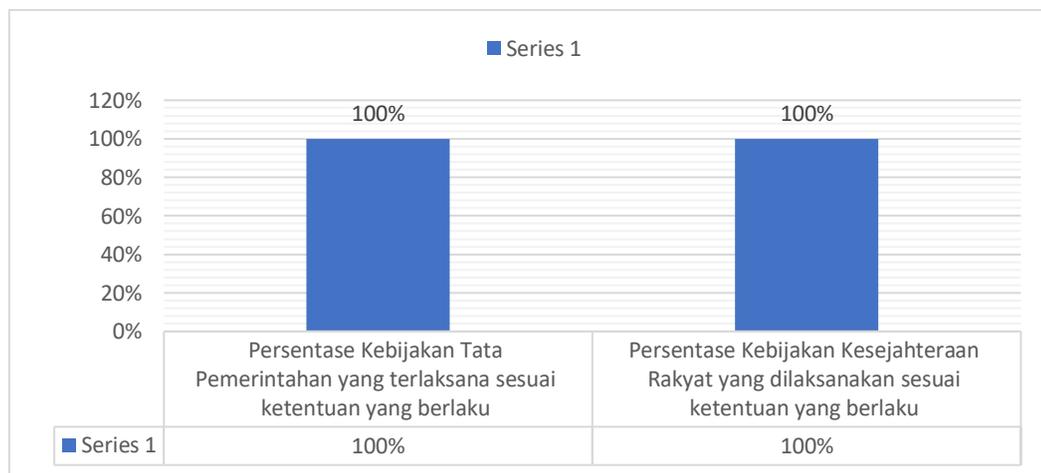
1. Administrasi Tata Pemerintahan;
2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
4. Fasilitasi Kerjasama Daerah.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis 1
“Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat”

No	Indikator Program	Formula	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori
1	Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku	Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana dibanding Kebijakan Tata Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target
2	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana dibanding Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Grafik 3.2
Realisasi Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis 1
“Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat”



Tabel 3.7**Daftar Kebijakan Yang Sudah Ditindak lanjuti pada Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Tahun 2024**

No	Kebijakan yang Sudah Ditindak Lanjuti	Penanggung Jawab
1	Keputusan Bupati Pati Nomor 274/1155 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.	Bagian Tata Pemerintahan
2	Keputusan Bupati Pati Nomor 274/2008 Tahun 2-24 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024.	Bagian Tata Pemerintahan
3	Keputusan Bupati Pati Nomor 247/2638 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 247/2008 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024.	Bagian Tata Pemerintahan
4	Keputusan Bupati Pati Nomor 589/2023 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam rangka Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024.	Bagian Tata Pemerintahan
5	Keputusan Bupati Pati Nomor 589/1008 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Nomor 589/0139 Tahun 2023 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR,	Bagian Tata Pemerintahan

	DPD, DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.	
6	Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026.	Bagian Tata Pemerintahan
7	Keputusan Bupati Pati Nomor 400/1852 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Pati Tahun 2024.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
8	Keputusan Bupati Pati Nomor 900/2806 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Hibah Kepada Lembaga Tempat Ibadah untuk Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah di Kabupaten Pati pada Perubahan APBD TA. 2024.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
9	Keputusan Bupati Pati Nomor 900/1792 Tahun 2024 tentang Penerima Besaran Bantuan Hibah Kepada Lembaga Tempat Ibadah untuk Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah di Kabupaten Pati pada APBD TA. 2024.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
10	Keputusan Bupati Pati Nomor 400/1014 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia MTQ Pelajar XXXIX dan MTQ Umum XXXI Tingkat Kabupaten Pati Tahun 2024.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
11	Keputusan Bupati Pati Nomor 400/1818 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sub Panitia Penyelenggaran MTQ XXX Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Pati Tahun 2024.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
12	Keputusan Bupati Pati Nomor 400/1860 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pati Periode 2024-2029.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
13	Keputusan Bupati Pati Nomor Tahun 2024 tentang Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
14	Keputusan Bupati Pati Nomor 900/ Tahun 2024 tentang Hibah Kepada Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
15	Keputusan Bupati Pati Nomor 400/2466 Tahun 2024 tentang Penetapan Perluasan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Pati Tahun 2025.	Bagian Kesejahteraan Rakyat

16	Keputusan Bupati Pati Nomor 400/1086 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pati.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
17	Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
18	Surat Edaran Bupati Pati Nomor 462/2113 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Pasung.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
19	Surat Edaran Bupati Pati Nomor 900/1304 Tahun 2024 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar).	Bagian Kesejahteraan Rakyat
20	Keputusan Bupati Pati Nomor 400/2500 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Pati.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
21	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Nomor 400/2038 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati Pati tentang Pencegahan Pernikahan Dibawah Umur.	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sumber: bagian di Lingkungan Setda Kab. Pati

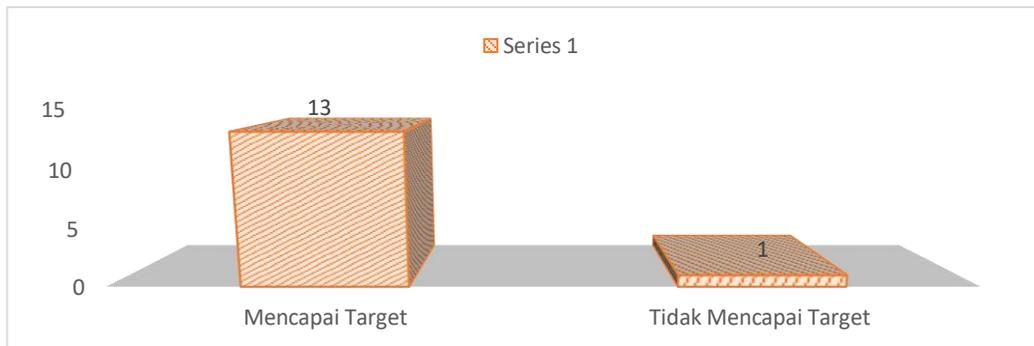
Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 1
“Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat”

Indikator Kinerja Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan (Bentuk Data)	Tahun 2024			Koordinator
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	
1. PERSENTASE KEBIJAKAN TATA PEMERINTAHAN YANG TERLAKSANA SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU	KEGIATAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	1. Persentase peraturan bidang tata pemerintahan pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)	%	100%	100%	100%	Bagian Tata Pemerintahan
		2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang tata pemerintahan	%	100%	100%	100%	Bagian Tata Pemerintahan
	1. Penataan Administrasi Pemerintah	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	Dokumen	15	15	100%	Bagian Tata Pemerintahan
	2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	Dokumen	13	13	100%	Bagian Tata Pemerintahan
	3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Dokumen	8	8	100%	Bagian Tata Pemerintahan
2. PERSENTASE KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU	KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase peraturan bidang kesra pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)	%	100%	100%	100%	Bagian Kesra
		2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang kesra	%	100%	100%	100%	Bagian Kesra
	1. Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Dokumen	34	34	100%	Bagian Kesra
	2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB	Dokumen	12	12	100%	Bagian Kesra

	3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kerajinan, trantibum linmas	Dokumen	8	8	100%	Bagian Kesra
	4. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Keluarga	50	50	100%	Bagian Kesra
	5. Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Keluarga	50	50	100%	Bagian Kesra
	KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase verifikasi rancangan/konsep produk hukum daerah	%	100%	104,08%	104,08%	Bagian Hukum
		Persentase kasus yang terselesaikan	%	100%	0%	0%	Bagian Hukum
	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	957	996	104,08%	Bagian Hukum
	2. Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Kasus	3	0	100%	Bagian Hukum
	3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Dokumen	957	996	104,08%	Bagian Hukum
	KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	%	100%	100%	100%	Bagian Tata Pemerintahan
	1. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	Dokumen	15	15	100%	Bagian Tata Pemerintahan
	2. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Dokumen	1	1	100%	Bagian Tata Pemerintahan
	3. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama	Laporan	2	2	100%	Bagian Tata Pemerintahan

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Grafik 3.3
Capaian Indikator Sub Kegiatan Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat"



Berdasarkan Grafik 3.4 di atas Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dapat disimpulkan bahwa dari 14 (empat belas) indikator sub kegiatan dan 4 (empat) indikator kegiatan, ada 13 (tiga belas) indikator sub kegiatan yang mencapai target, dan 1 (satu) indikator sub kegiatan tidak mencapai target yaitu **Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum** oleh karena bersifat fasilitasi dan tidak ada permohonan bantuan hukum dari aparaturnya pemerintah daerah.

Sasaran Strategis II
“Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun
Perekonomian dan Pembangunan”

Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, ditetapkanlah Sasaran Strategis II Meningkatkan Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator kinerja Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan. Berikut adalah hasil pengukuran penetapan kinerja Seketariat Daerah yang telah dicapai Tahun 2024 dan dilakukan analisis capaian atas indikator kinerja Sasaran Strategis II sebagai berikut :

Tabel 3.9

Tabel Capaian Sasaran strategis II “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan ”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori
1	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	78,57%*	78,%*	Tidak Mencapai Target

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati, tahun 2024

** : capaian tahun 2024 masih dalam proses olah data*

Berdasarkan tabel 3.9 diatas capaian Sasaran Strategis II “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan” adalah tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 78,57% oleh karena ada 3 (tiga) indikator kinerja daerah dari total 14 (empat belas) indikator yang berada pada rumpun perekonomian dan Pembangunan belum mencapai kriteria capaian tinggi dan sebagian besar nilai indikator kinerja pada Tahun 2024 yang mendukung sasaran strategis II masih menggunakan nilai capaian pada tahun 2023 oleh karena nilai capaian pada Tahun 2024 masih dalam proses olah data. Realisasi Kinerja Sasaran Strategis II sebesar 78,57% tersebut diperoleh dari perhitungan sebagaimana berikut :

(Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah rumpun Perekonomian dan Pembangunan yang memenuhi kriteria penilaian tinggi Permendagri No. 86 Tahun 2017 hal. 494 / Indikator Kinerja Daerah) x 100%

Capaian Indikator Kinerja Daerah yang mendukung Sasaran Strategis II “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan” sebagai berikut :

Tabel 3.10
Tabel Capaian Indikator Kinerja Daerah yang mendukung Sasaran Strategis II “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan”

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kriteria
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,02%	4,72%	5,73%	121,40%	Sangat Tinggi
a	Pertumbuhan PDRB lap. Usaha pertanian	3,26%	3,65%	0,82%*	22,47%*	Sangat Rendah
b	Pertumbuhan PDRB lap. Usaha industri pengolahan	6,45%	5,43%	6,45%*	118,78%*	Sangat Tinggi
c	Pertumbuhan PDRB lap. Usaha perdagangan	5,93%	3,49%	5,93%*	169,91%*	Sangat Tinggi
d	PDRB per kapita ADHB	40.294,88	45.014,27	40.294,88*	96,75%*	Sangat Tinggi
e	PDRB per kapita ADHK	25.736,05	37.077,90	25.736,05*	69,41%*	Sedang
f	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	76,52%	77,00%	78,92%	102,49%	Sangat Tinggi
g	Indeks Ketimpangan Pendapatan (versi World Bank)	21,56	20,14	21,56*	107,05%*	Sangat Tinggi
h	Angka kriminalitas	2,79	1,41	2,02	69,80%	Sedang
i	Persentase kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB	0,04%	0,055%	0,04%*	137,50%*	Sangat Tinggi
j	IKLH	60,63	52,87	60,63*	114,68%*	Sangat Tinggi
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,29%	3,49%	3,87%	90,18%*	Tinggi
a	Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja	1,84	1,40	1,15	121,74%	Sangat Tinggi
b	TPAK	73,10%	69,30%	76,75%	110,75%	Sangat Tinggi

Sumber: Data Badan Pusat Statistik tahun 2024

* : Capaian tahun 2023, capaian tahun 2024 masih dalam proses olah data

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat disimpulkan analisa sebagai berikut dimana Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 yang mendukung Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan” belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 85,71% oleh karena dari total 14 (empat belas) indikator kinerja daerah yang berada pada rumpun perekonomian dan Pembangunan, 3 (tiga) diantaranya tidak memenuhi kriteria capaian tinggi adalah sebagai berikut :

1. Capaian PDRB Lapangan Usaha Pertanian dan PDRB per Kapita ADHK pada Tahun 2024 masih proses olah data. Sehingga data yang dipakai capaian Tahun 2023 adalah sebesar 0,82% dengan target Tahun 2024 sebesar 3,65%.
2. Angka kriminalitas pada tahun 2024 masih tinggi yaitu sebesar 2,02 dari target Tahun 2024 sebesar 1,41 hal ini didominasi dengan kasus penipuan di era digital melalui media sosial, selain itu pengaruh negative media social pada remaja sehingga banyak terjadi perilaku menyimpang pada remaja diantaranya kekerasan, tawuran dengan menggunakan sajam, pengaruh miras dan narkoba yang sering memicu terjadinya kriminalitas.

Sasaran Strategis 1 tersebut telah memenuhi kriteria penilaian tinggi dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah rumpun Perekonomian dan Pembangunan yang memenuhi kriteria penilaian tinggi Permendagri No. 86 Tahun 2017 hal. 494 = **sebanyak 12 Indikator Kinerja (terdiri dari 2 indikator tujuan dan 10 indikator sasaran)**
2. Jumlah Indikator Kinerja Daerah pada rumpun Perekonomian dan Pembangunan : **sebanyak 19 Indikator Kinerja (terdiri dari 3 indikator tujuan dan 16 indikator sasaran)**

Jadi perhitungannya : $(11/14) \times 100\% = 78,57\%$

Strategi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis II **“Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan”** ini diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis II Meningkatkan Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan antara lain :

Program

Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

Untuk mengukur realisasi program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target Sasaran Strategis II Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis II "Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan "

No	Indikator Program	Formula	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori
1	Presentase Kebijakan Perekonomian, Pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Kebijakan Perekonomian, Pembangunan, dan SDA yang terlaksana dibanding Kebijakan Perekonomian, Pembangunan, dan SDA	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target

Sumber: bagian di Lingkungan Setda Kab. Pati

Tabel 3.12
Kebijakan Yang Sudah Ditindak Lanjuti Pada Rumpun Perekonomian dan Pembangunan pada Tahun 2024

No	Kebijakan yang Sudah Ditindak Lanjuti	Penanggung Jawab
1	Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024.	Bagian Perekonomian
2	Keputusan Bupati Pati Nomor 900/3042 Tahun 2024 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus untuk Stimulan Perluasan Jaringan Listrik di Kabupaten Pati pada Perubahan APBD TA. 2024.	Bagian Administrasi Pembangunan
3	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Nomor 050/2032 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Pati.	Bagian Administrasi Pembangunan

4	Keputusan Bupati Pati Nomor 137/2497 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Tugas dan Kewenangan dalam Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa untuk Katalog Elektronik Lokal di Kabupaten Pati.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
5	Keputusan Bupati Pati Nomor 020/1748 Tahun 2024 tentang Penetapan Paket Strategis Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
6	Keputusan Bupati Pati Nomor 050/2714 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati Nomor 050/2642 Tahun 2024 tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Sektor Kesehatan tentang Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
7	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Nomor 050/2093 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Sektor Kesehatan tentang Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
8	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Nomor 137/2068 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Katalog Elektronik Lokal di Kabupaten Pati.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
9	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Nomor 060/2074 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
10	Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Pati Nomor 083/ 020 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Selaku Kepala Unit Pengadaan Barang/	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

	Jasa Nomor 083/019 Tahun 2023 tentang Penetapan Pokja Pemilihan dalam Pelaksanaan Tender, Seleksi, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat Serta Staf Pendukung dalam Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Staf Pendukung Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Pati.	
11	Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Pati Nomor 083/ 021 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Selaku Kepala Unit Pengadaan Barang/ Jasa Nomor 083/019 Tahun 2023 tentang Penetapan Pokja Pemilihan dalam Pelaksanaan Tender, Seleksi, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat Serta Staf Pendukung dalam Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Staf Pendukung Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Pati.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
12	Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Pati Nomor 083/ 022 Tahun 2024 tentang Penetapan Pokja Pemilihan dalam Pelaksanaan Tender, Seleksi, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat Serta Staf Pendukung dalam Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Staf Pendukung Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Pati.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
13	Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Pati Nomor 083/ 023 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Selaku Kepala Unit Pengadaan Barang/ Jasa Nomor 083/022 Tahun 2024 tentang Penetapan Pokja Pemilihan dalam Pelaksanaan Tender, Seleksi,	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

	Penunjukan Langsung dan Tender Cepat Serta Staf Pendukung dalam Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Staf Pendukung Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Pati.	
--	---	--

Sumber: bagian di Lingkungan Setda Kab. Pati

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis II
“Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan
Pembangunan”

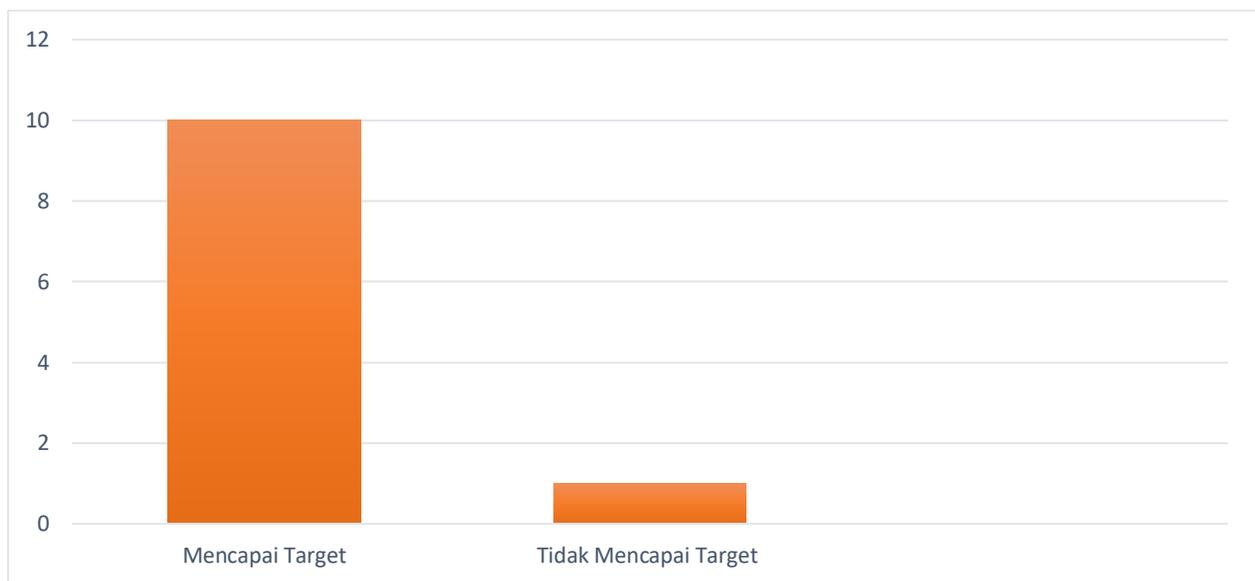
Indikator Kinerja Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan (Bentuk Data)	Tahun 2023			Koordinator
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	
PRESENTASE KEBIJAKAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN, DAN SDA YANG DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	1. Persentase peraturan bidang perekonomian pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE) Bupati, SE)	%	100 %	100 %	100 %	Bagian Perekonomian
		2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang perekonomian	%	100 %	100 %	100 %	Bagian Perekonomian
	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	44	44	100 %	Bagian Perekonomian
	2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan pengendalian dan distribusi perekonomian	Dokumen	127	104	81,8 9%	Bagian Perekonomian

	3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Dokumen	62	62	100 %	Bagian Perekonomian
	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	%	90 %	40,8 2%	45,3 6%	Bagian Adm. Pembangunan
	1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen analisis dan pengkajian pembangunan daerah	Dokumen	1	1	100 %	Bagian Adm. Pembangunan
	2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Laporan	6	6	100 %	Bagian Adm. Pembangunan
	3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Laporan	46	46	100 %	Bagian Adm. Pembangunan
	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase penyelesaian pemilihan penyedia (tender) oleh UKPBJ	%	100 %	100 %	100 %	Bagian PBJ
	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Dokumen	13	13	100 %	Bagian PBJ
	2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	Dokumen	29	29	100 %	Bagian PBJ
	3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Orang	100	100	100 %	Bagian PBJ
	PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang sumber daya alam	%	100 %	100 %	100 %	Bagian Perekonomian
	1. koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan, dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	Dokumen	8	8	100 %	Bagian Perekonomian

	2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan	Dokumen	18	18	100 %	Bagian Perekonomian
--	--	---	---------	----	----	-------	---------------------

Sumber: bagian di Lingkungan Setda Kab. Pati

Grafik 3.4
Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Sasaran Strategis II “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan”



Berdasarkan Grafik 3.4 dapat disimpulkan bahwa dari 11 (sebelas) Indikator Sub Kegiatan pada Sasaran Strategis II “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan” ada 10 (sepuluh) Indikator Sub Kegiatan yang mencapai target dan ada 1 (satu) Indikator Sub Kegiatan yang tidak mencapai target yaitu pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dari target kinerja 127 dokumen terealisasi sebesar 104 dokumen oleh karena adanya penundaan jadwal monitoring yang terjadi menjelang perubahan anggaran Tahun 2024.

“Meningkatnya Fasilitasi dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda”

Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, ditetapkanlah Sasaran Strategis III : Meningkatkan Fasilitasi dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda dengan indikator IKM Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Berikut adalah hasil pengukuran penetapan kinerja Sekretariat Daerah yang telah dicapai Tahun 2024 dan dilakukan analisis capaian atas indikator kinerja Sasaran Strategis III sebagai berikut :

Tabel 3.14

Tabel Capaian Sasaran strategis III “Meningkatnya Fasilitasi dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2023	Kategori
1	Meningkatnya Fasilitasi dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda	IKM Sekretariat Daerah	3,53	3,89	3,91	110,76%	Melampaui Target

Sumber: bagian di Lingkungan Setda Kab. Pati

Berdasarkan tabel 3.14 diatas capaian Sasaran Strategis III “Meningkatnya Fasilitasi dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda” adalah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 110,76%. Hal tersebut membuktikan bahwa rata – rata pengguna layanan yang datang ke tempat pelayanan di Lingkungan Setda Kabupaten Pati merasa sangat Puas terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa mutu pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati pada Tahun 2024 berkategori sangat baik.

Rencana Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah terus membenahi sarana dan prasarana dan peningkatan kebersihan yang mengarah pada upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna layanan. Selain itu rencana tindak lanjut pada unsur Penanganan Pengaduan nantinya perlu diperhatikan terkait tanggung jawab untuk merespon setiap aduan / laporan yang masuk dan ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing. Penyediaan kotak saran / aduan perlu diperbaiki dan kesigapan petugas dalam menerima Laporan yang masuk untuk dicatat

dan diteruskan kepada pihak yang dituju sesuai dengan tugas dan fungsi yang menangani pengaduan.

Strategi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis III ini diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis 3 antara lain :

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan

1. Kegiatan Penataan Organisasi
2. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pengukuran realisasi program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target Sasaran Strategis III Meningkatnya Fasilitasi dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis III "Meningkatnya Fasilitasi dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda"

No	Indikator Program	Formula	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori
1	Persentase Kebijakan Penataan Organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.	Kebijakan Penataan Organisasi yang terlaksana dibanding Kebijakan Penataan Organisasi	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target
2	Persentase Saluran Informasi Publik terkait Pimpinan yang aktif (media tv, cetak, online, radio, dan banner).	Saluran Informasi Publik terkait Pimpinan yang aktif dibanding Saluran Informasi Publik terkait Pimpinan	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target

Sumber: bagian di Lingkungan Setda Kab. Pati

Tabel 3.16
Kebijakan Penataan Organisasi yang Sudah Ditiindak Lanjuti pada Tahun 2024

No	Kebijakan yang Sudah Ditindak Lanjuti	Penanggung Jawab
1	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.	Bagian Organisasi
2	Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Cara Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.	Bagian Organisasi
3	Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.	Bagian Organisasi
4	Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.	Bagian Organisasi
5	Keputusan Bupati Pati Nomor 060/1822 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.	Bagian Organisasi

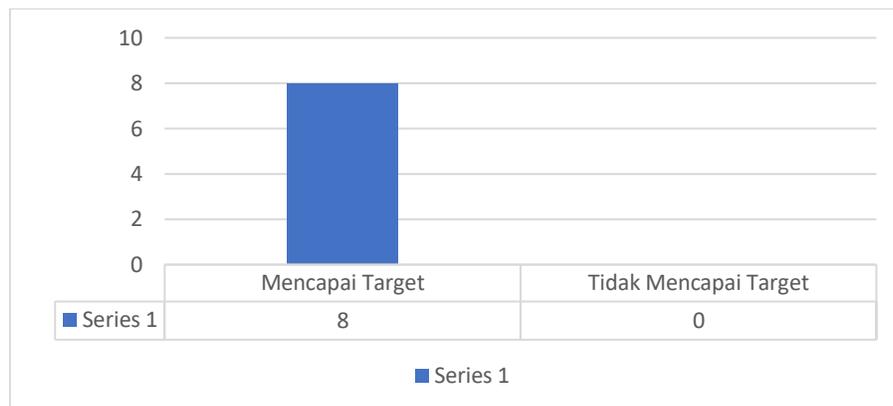
Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pati

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Sasaran Strategis III
"Meningkatnya Fasilitas dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan
Internal dan Eksternal Setda

Indikator Kinerja Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan (Bentuk Data)	Tahun 2024			Koordinator
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	
1. PRESENTASE KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI YANG DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU	PENATAAN ORGANISASI	1. Persentase peraturan bidang organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dalam peraturan daerah	%	100 %	100 %	100%	Bagian Organisasi
		2. Persentase penyediaan analisis bidang organisasi	%	100 %	100 %	100%	Bagian Organisasi
2. PERSENTASE SALURAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT PIMPINAN YANG AKTIF	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Dokumen	12	12	100%	Bagian Organisasi
	2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitas pelayanan publik dan tata laksana	Laporan	5	5	100%	Bagian Organisasi
	3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Dokumen	4	4	100%	Bagian Organisasi
	4. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Dokumen	1	1	100%	Bagian Organisasi
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Dokumen	1	1	100%	Bagian Organisasi
	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Jumlah saluran informasi publik terkait pimpinan yang dilaksanakan	Media	5	5	100%	Bagian Prokompim
	1. Fasilitas Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitas keprotokolan	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokompim
	2. Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitas komunikasi pimpinan	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokompim
	3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokompim

Sumber: bagian di Lingkungan Setda Kab. Pati

Grafik 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Sasaran Strategis III
"Meningkatnya Fasilitasi dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda"



Berdasarkan grafik 3.5 diatas capaian indikator kinerja pada sasaran strategis III Meningkatkan Fasilitasi dan Pelayanan Kebutuhan di Lingkungan Internal dan Eksternal Setda terlihat bahwa seluruh indikator sub kegiatan dengan total 8 (delapan) indikator sub kegiatan.

EVALUASI KINERJA

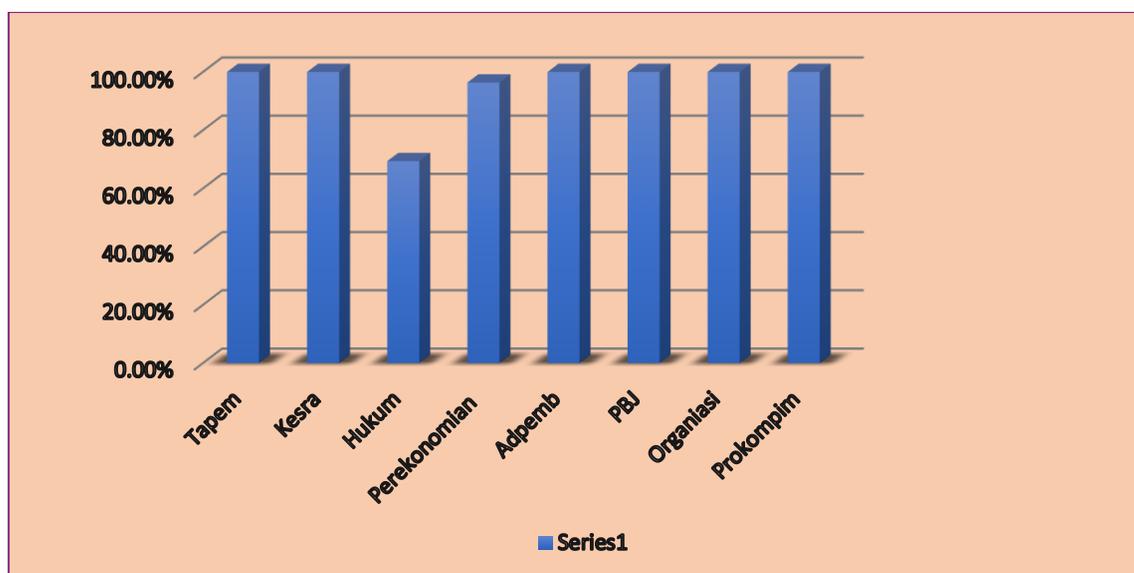
Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dari data yang kami peroleh, berikut tingkat capaian kinerja per bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut :

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Bagian

No	Bagian	Capaian Kinerja %	Tingkat Keberhasilan
1	Bagian Tata Pemerintahan	100%	BAIK
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	100%	BAIK
3	Bagian Hukum	69,38%	CUKUP
4	Bagian Perekonomian	96,38%	BAIK
5	Bagian Administrasi Pembangunan	100%	BAIK
6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100%	BAIK
7	Bagian Organisasi	100%	BAIK
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	BAIK

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Grafik 3.6
Capaian Kinerja Bagian



Dari Grafik 3.6 dapat kita analisa bahwa sebagian besar indikator kinerja yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sudah mencapai target, akan tetapi masih ada beberapa indikator kinerja yang ada pada Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian yang capaian kinerjanya belum mencapai target oleh karena indikator tersebut bersifat fasilitasi atau sediaan dan adanya efisiensi, sebagai berikut :

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Yang Belum Mencapai Target

No	Indikator Kinerja	Satuan (Bentuk Data)	Tahun 2024			Penyebab
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Kasus	3	0	0%	Tidak adanya permohonan bantuan hukum dari aparat pemerintah daerah .

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi. Merujuk pada kegiatan yang masih belum mencapai target, secara garis besar yang disebabkan oleh karena bersifat sediaan sehingga hal ini secara tidak langsung berpengaruh dalam pencapaian realisasi kinerja. Selain itu evaluasi atas perencanaan kinerja yang disusun dan ditetapkan agar target yang diharapkan dapat dicapai bahkan lebih. Langkah ke depan, dalam perencanaan perlu menetapkan target yang tepat dan selaras (sesuai dengan PK (Perjanjian Kinerja) dan Renstra Setda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026). Selain itu dalam menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, menetapkan indikator yang terukur dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.2 EFISIENSI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan setelah adanya perubahan anggaran dapat digambarkan pada tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	REALISASI	%	BAGIAN
SASARAN I Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku 2. Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	1. Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 1.350.000.000 ,-	Rp. 1.500.000.000,-	Rp.150.000.000 ,-	Rp. 1.426.806.409,-	95,12 %	Bagian Tapem
		1. Penataan Administrasi Pemerintah	Rp. 386.350.000 ,-	Rp. 536.350.000,-	Rp. 150.000.000,-	Rp.490.889.259,-	91,52%	Bagian Tapem
		2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 713.650.000,-	Rp. 713.650.000,-	-	Rp.699.789.921,-	98,06%	Bagian Tapem
		3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp.250.000.000,-	Rp.250.000.000,-	-	Rp. 236.127.229,-	94,45%	Bagian Tapem
		2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 8.781.000.000,-	Rp. 8.898.010.000,-	Rp. ,-	Rp. 7.977.803.427,-	89,66%	Bagian Kesra
		1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp. 7.890.000.000,-	Rp. 7.932.000.000,-	Rp. 42.000.000,-	Rp. 7.125.187.027,-	89,83%	Bagian Kesra
		2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 706.000.000,-	Rp. 763.010.000,-	Rp. 57.010.000,-	Rp. 670.320.900,-	87,85%	Bagian Kesra
		3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 150.000.000,-	Rp. 168.000.000,-	Rp. 18.000.000,-	Rp. 151.048.000,-	89,91%	Bagian Kesra
		4. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	-	Rp. 12.022.500,-	80,15%	Bagian Kesra
		5. Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	-	Rp. 19.225.000,-	96,13%	Bagian Kesra

		untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing						
		3. Fasilitas Kerjasama Daerah	Rp. 1.370.680.000,-	Rp. 1.620.680.000,-	Rp. 250.000.000,-	Rp. 1.146.058.748,-	70,71%	Bagian Tapem
		1. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 273.900.000,-	Rp. 273.900.000,-	-	Rp. 215.315.042,-	78,61%	Bagian Tapem
		2. Fasilitas Bantuan Hukum	Rp. 488.180.000,-	Rp. 488.180.000,-	-	Rp. 140.795.799,-	28,84%	Bagian Tapem
		3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 608.600.000,-	Rp. 858.600.000,-	Rp. 250.000.000,-	Rp. 789.947.905,-	92,00%	Bagian Tapem
		4. Fasilitas Kerjasama Daerah	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-	-	Rp. 115.259.300,-	96,05%	Bagian Tapem
		1. Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	-	Rp. 96.534.300,-	96,53%	Bagian Tapem
		2. Fasilitas Kerjasama Luar Negeri	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	-	Rp. 8.945.000,-	89,45%	Bagian Tapem
		3. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	-	Rp. 9.780.000,-	97,80%	Bagian Tapem
JUMLAH SASARAN 1			Rp. 11.621.680.000,-	Rp. 12.138.690.000,-	Rp. 517.010.000,-	Rp. 10.665.927.882,-	87,87%	
SASARAN II Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan	1. Persentase kebijakan perekonomian, pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 416.000.000,-	Rp.408.475.000,-	(Rp. 7.525.000,-)	Rp. 362.374.103,-	88,71%	Bagian Perekonomian
		1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 47.000.000,-	Rp. 42.935.000,-	(Rp. 4.065.000,-)	Rp. 41.938.953,-	97,68%	Bagian Perekonomian
		2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 212.500.000,-	Rp. 216.765.000,-	Rp. 4.265.000	Rp. 193.133.500,-	89,10%	Bagian Perekonomian
		3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp. 156.500.000,-	Rp. 148.775.000,-	(Rp. 7.725.000,-)	Rp. 127.301.650,-	85,57%	Bagian Perekonomian

		2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 250.000.000,-	Rp. 250.000.000,-	-	Rp. 233.772.700,-	93,51%	Bagian Adpemb
		1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp. 60.000.000,-	Rp. 32.000.000,-	(Rp. 28.000.000,-)	Rp. 29.306.500,-	91,58%	Bagian Adpemb
		2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp. 90.000.000,-	Rp. 135.500.000,-	Rp. 45.500.000,-	Rp. 128.988.600,-	95,19%	Bagian Adpemb
		3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 82.500.000,-	(Rp. 17.500.000,-)	Rp. 75.477.600,-	91,49%	Bagian Adpemb
		3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 170.000.000,-	Rp. 170.000.000,-	-	Rp. 156.326.566,-	91,96%	Bagian PBJ
		1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 36.300.000,-	Rp. 36.300.000,-	-	Rp. 33.405.517,-	92,03%	Bagian PBJ
		2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 41.700.000,-	Rp. 41.700.000,-	-	Rp. 40.511.049,-	97,15%	Bagian PBJ
		3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 92.000.000,-	Rp. 92.000.000,-	-	Rp. 82.410.000,-	89,58%	Bagian PBJ
		4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 116.000.000,-	Rp. 36.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Rp.127.061.117,-	93,43%	Bagian Perekonomian
		1. koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	Rp. 106.000.000,-	Rp. 126.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Rp. 117.251.117,-	93,06%	Bagian Perekonomian
		2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi kebijakan Energi dan Air	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	-	Rp. 9.810.000,-	98,10%	Bagian Perekonomian
		JUMLAH SASARAN 2			Rp. 952.000.000,-	Rp. 964.475.000,-	Rp. 12.475.000,-	Rp. 879.534.486,-
SASARAN STRATEGIS 3	1. Persentase kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Persentase saluran informasi publik terkait pimpinan yang aktif	1. Penataan Organisasi	Rp. 680.000.000,-	Rp. 680.000.000,-	-	Rp. 646.674.089,-	95,10%	Bagian Organisasi
		1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 350.000.000,-	Rp. 350.000.000,-	-	Rp. 339.355.234,-	96,96%	Bagian Organisasi
		2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	-	Rp. 98.197.198,-	98,20%	Bagian Organisasi
		3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-	-	Rp. 180.390.157,-	90,20%	Bagian Organisasi

	4. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-	Rp. 4.985.000,-	99,70%	Bagian Organisasi
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	-	Rp. 23.746.500,-	94,99%	Bagian Organisasi
	2. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 1.259.000.000,-	Rp. 1.643.454.000,-	Rp. 384.454.000,-	Rp.1.428.747.666,-	86,94%	Bagian Prokompim
	1. Fasilitasi Keprotokolan	Rp. 105.000.000,-	Rp. 135.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp. 112.396.742,-	83,26%	Bagian Prokompim
	2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp. 71.600.000,-	Rp. 85.754.000,-	Rp. 14.154.000,-	Rp. 65.459.180,-	76,33%	Bagian Prokompim
	3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp. 1.082.400.000	Rp. 1.422.700.000,-	Rp. 340.300.000,-	Rp. 1.250.891.744,-	87,92%	Bagian Prokompim
JUMLAH SASARAN 3		Rp. 1.939.000.000,-	Rp. 2.323.454.000,-	Rp. 384.454.000,-	Rp. 2.075.421.755,-	89,32%	
JUMLAH SASARAN 1,2, 3		Rp. 14.512.680.000,-	Rp. 15.426.619.000,-	Rp. 913.939.000,-	Rp. 13.620.884.123,-	88,29%	

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Tabel 3.21
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			
				Target 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian	Anggaran 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik		1. Persentase Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah	100%	93,18*	98,18%*				
			2. Nilai SAKIP	65.50	65,89	100,60%				
			3. Nilai IKM	3.42	3,78	110,53%				
		Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%*	100%*	Rp. 12.138.690.000,-	Rp. 10.665.927.882,-	87,87%	Rp. 1.472.762.118,-
	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	100%	78,57%*	78,57%*	Rp. 964.475.000,-	Rp. 879.534.486,-	91,19%	Rp. 84.940.514,-	
	Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda	IKM SETDA	3.53	3.91	110,76%	Rp. 2.323.454.000,-	Rp. 2.075.421.755,-	89,32%	Rp. 248.032.245,-	

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati, Tahun 2024

* : Capaian tahun 2024 masih dalam proses olah data

Dari Tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pagu Anggaran Perubahan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.15.426.619.000,- dengan realisasi Rp. 13.620.884.123,- Dengan serapan anggaran pada tahun 2024 sebesar 88,29%. Dengan demikian pada tahun anggaran 2024 terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.805.734.877,-

Tabel 3.22
Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja Masing-masing Bagian
Tahun Anggaran 2024

No	Bagian	Pagu Anggaran Murni	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)	Capaian kinerja
1	Tata Pemerintahan	Rp. 1.470.000.000,-	Rp. 1.620.000.000,-	Rp. 1.542.065.709,-	4,81%	100%
2	Kesejahteraan Rakyat	Rp. 8.781.000.000,-	Rp. 8.8.010.000,-	Rp. 7.977.803.427,-	10,34%	100%
3	Hukum	Rp. 1.370.680.000,-	Rp. 1.620.680.000,-	Rp. 1.146.058.746,-	29,29%	69,38%
4	Perekonomian	Rp. 532.000.000,-	Rp.544.475.000,-	Rp.489.435.220,-	10,11%	96,38%
5	Administrasi Pembangunan	Rp. 250.000.000,-	Rp. 250.000.000,-	Rp.233.772.700,-	6,49%	100%
6	PBJ	Rp. 170.000.000,-	Rp. 170.000.000,-	Rp.156.326.566,-	8,04%	100%
7	Organisasi	Rp. 680.000.000,-	Rp. 680.000.000,-	Rp. 646.674.089,-	4,9%	100%
8	Prokompim	Rp. 1.259.000.000,-	Rp. 1.643.454.000,-	Rp. 1.428.747.666,-	13,06%	100%

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

3.3 Inovasi



Dalam mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, salah satunya adalah dengan cara sosialisasi PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) di lingkup kegiatan perencanaan. Metode Sosialisasi sering dipakai dalam pengarusutamaan gender, namun sering belum efektif dalam pelaksanaannya. Salah satu indikatornya adalah masih terdapatnya bias gender dalam analisis GAP (Gender 2 Analysis Pathway) yang dilakukan dalam beberapa sampel sub kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

Untuk itu diperlukan cara yang efektif dalam memberikan pemahaman terkait gender dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran perlu dilakukan ke setiap stakeholder di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Media Pembelajaran mengandung pengertian segala sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber pembelajaran ke peserta didik (individu atau kelompok), yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat pembelajar sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran (di dalam/ di luar kelas) menjadi lebih efektif.

Salah satunya dengan penyusunan buku saku gender sebagai media pembelajaran. Buku berukuran kecil yang berisi tulisan dan gambar berupa penjelasan yang dapat mengarahkan atau memberikan petunjuk mengenai pengetahuan, mudah dibawa kemana-mana.

Penyusunan Buku Saku Gender dimaksudkan untuk memberi informasi yang benar tentang gender secara praktis bagi user. Adapun tujuan penyusunan Buku Saku Gender online adalah sebagai berikut :

1. Meminimalkan bias gender;
2. Buku Saku menjadi rujukan praktis dalam PUG di masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD;
3. Memberi guiden praktis dalam PPRG.

Namun demikian, pengertian harfiah buku dalam makna fisik akan menimbulkan kendala anggaran. Terdapat sebuah solusi bahwa kendala anggaran bisa diatasi dengan penyusunan buku saku gender secara online dengan memanfaatkan fitur-fitur tidak berbayar di internet. Keunggulan dari pembuatan buku saku online selain tidak berbiaya juga memudahkan pembacanya, karena untuk mengaksesnya tinggal mengklik tautan yang ada di telepon genggam kita. Berbasis Online bukan Hard Copy agar praktis dan tidak menimbulkan biaya dengan penggunaan ekstensi PDF yang ditampilkan apik dengan memanfaatkan tampilan pdf di <https://fliphtml5.com/>, dengan harapan bisa diduplikasi di Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

Impact dari Buku Saku Gender Online sebagai alat bantu terhadap perubahan mindset terkait bias gender adalah tersampainya pemahaman praktis terkait gender. Perubahan mindset diperlukan karena dengan adanya perubahan mindset diharapkan ASN mampu mengembangkan mindset yang positif dan meminimalisasi mindset yang negatif. Ini berarti akan mensukseskan tugas dan peranan ASN sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan pelayan masyarakat.

Dengan kemudahan akses dan kemudahan dalam menangkap isi dari Buku Saku Gender Online diharapkan akan membantu pemahaman dalam proses Pengarusutamaan Gender di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Dengan demikian, akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pati dengan adanya salah satu bekal gender mindset yang bersifat anti diskriminasi untuk dimiliki ASN sebagai pelayan masyarakat.

3.4 Penghargaan



Penghargaan konsolidasi kertas adalah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah atas keberhasilannya dalam menggabungkan pengadaan kertas HVS melalui Katalog Elektronik yang diampu oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Penghargaan ini diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI).

Beberapa pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan ini adalah : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Pati. penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang.

Konsolidasi pengadaan merupakan strategi yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/ jasa sejenis menjadi satu proses pengadaan bersama. Pendekatan ini diharapkan dapat: meningkatkan efisiensi anggaran, mengurangi biaya transaksi, mendorong daya saing pelaku usaha lokal, memastikan pemerintah sebagai pembeli utama mendapatkan kualitas terbaik.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 merupakan wujud semangat akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam melaksanakan berbagai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin profesional, efektif dan efisien. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategisnya.

Keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran secara umum disebabkan oleh :

1. Mekanisme perencanaan yang jelas.
2. Memperhatikan hasil evaluasi program dan kegiatan atas program yang telah dilaksanakan.
3. Melaksanakan pemantauan atas realisasi kegiatan baik dari sisi kinerja dan keuangan dalam setiap triwulan.
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan target yang direncanakan.

Adapun yang menjadi tantangan saat ini:

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan dimana pada Tahun 2024 ini Setda mengawal tercapainya Indikator Kinerja Daerah, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan- persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan- tantangan ini terutama Nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan koordinasi dan penggalan berbagai masalah di masyarakat agar kebijakan tepat sasaran. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada

rencana dan upaya untuk menerapkan siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga hal ini akan menjadikan LKjIP benar- benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintah dan perbaikan layanan publik semakin baik

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 ini disusun dan kiranya dapat menggambarkan capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Pati.

Pati, 28 Februari 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Pati



Drs. Jumani, M.Si
Pembina Utama Madya / IVd
NIP. 19701114 199011 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. JUMANI, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pati

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T.

Jabatan : Pj. Bupati Pati

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, 12 Januari 2024



Pihak Kedua

HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T.



Pihak Pertama

Drs. JUMANI, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik	1. Persentase Tingkat capaian Indikator Kinerja Daerah 2. Nilai SAKIP 3. Nilai IKM	100% 65,50 3,42
1.	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%
2.	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	100%
3.	Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda	Angka Nilai IKM Sekretariat Daerah	3,53

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.939.000.000,00	APBD KAB
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 11.621.680.000,00	APBD KAB
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 852.000.000,00	APBD KAB

Pati, 22 Januari 2024



Pj. BUPATI PATI

HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PATI

Drs. JUMANI, M.Si.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. JUMANI, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pati

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si.

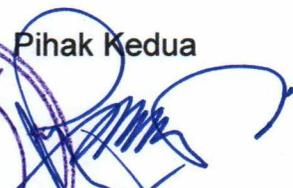
Jabatan : Pj. Bupati Pati

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua

Dr. Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si.

Pihak Pertama

Drs. JUMANI, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik	1. Persentase Tingkat capaian Indikator Kinerja Daerah 2. Nilai SAKIP 3. Nilai IKM	100% 65,50 3,42
1.	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%
2.	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	100%
3.	Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda	Angka Nilai IKM Sekretariat Daerah	3,53

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.323.454.000,00	APBDP KAB
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 12.138.690.000,00	APBDP KAB
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 964.475.000,00	APBDP KAB

Pati, 10 Oktober 2024

Pj. BUPATI PATI



Dr. Ir. SUJARWANTO DWI ATMOKO, M.Si.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PATI



Drs. JUMANI, M.Si.